

UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI USAHA TERNAK DITINJAU DARI ASPEK AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING

Masdjidin Siregar dan Nyak Ilham

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze factors influencing the efficiency of livestock production by using competitive and comparative advantage approaches based on the data and information gathered in the previous studies. The results indicate that livestock production in Indonesia is relatively efficient from both financial and economic criteria. To increase the efficiency, significant government roles are still needed especially in public investments, zoning, and balancing production scales. Public investments are required in research, extension, breeding, and marketing facilities (livestock market places, transportation, and slaughtering houses). Zoning policy should take grazing fields into consideration and such a policy should be backed up by strong district regulation. Scale distribution of agribusiness should be arranged such that conflict between large agribusiness and smallholders could be minimized.

Key words: *livestock, efficiency, zoning*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang menentukan efisiensi usaha ternak dengan pendekatan analisis kelayakan finansial (keunggulan kompetitif), dan analisis kelayakan ekonomi (keunggulan komparatif). Untuk mengetahui besaran-besaran yang mengindikasikan kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi tersebut digunakan review hasil-hasil studi terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak yang dilakukan di Indonesia sudah cukup efisien baik dari segi kriteria profitabilitas usaha maupun dari segi keunggulan komparatif. Untuk peningkatan efisiensi tersebut diperlukan peran pemerintah yang relatif besar antara lain berupa investasi, pengaturan tata ruang, dan pengaturan pola pengusahaan. Investasi diperlukan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pembibitan, sarana pemasaran (yang meliputi pasar ternak, transportasi dan Rumah Potong Ternak. Pengaturan tata ruang dihubungkan dengan penyediaan lahan penggembalaan umum dengan dasar hukum yang kuat (Perda) pada daerah sentra produksi. Pengaturan pola pengusahaan diupayakan agar tidak terjadi benturan antara usaha agribisnis besar (pengusaha) dengan usaha agribisnis berbasis kerakyatan.

Kata kunci: *peternakan, efisiensi, tata ruang*

PENDAHULUAN

Konsep agribisnis memandang suatu usaha pertanian termasuk usaha ternak secara holistik sejak dari subsistem penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran. Pada masa sebelumnya, dengan paradigma pembangunan peternakan yang lama, menyebabkan struktur agribisnis peternakan tersekat-sekat, sehingga yang memperlemah daya saing produk peternakan itu sendiri akibat adanya margin ganda dan transmisi harga dalam berbagai bentuk (Saragih, 1998).

Pembangunan pertanian dan peternakan yang menggunakan konsep agribisnis harus memperhatikan dua hal penting. Pertama, berupaya memperkuat subsistem dalam satu sistem yang terintegrasi secara vertikal dalam satu kesatuan manajemen. Kedua, menciptakan perusahaan-perusahaan agribisnis yang efisien pada setiap subsistem. Jika hal ini dapat tercapai maka produk peternakan, yaitu : daging, telur, dan susu akan meningkat daya saingnya terutama dalam menghadapi pasar global.

Permasalahannya tidak hanya sekedar bagaimana meningkatkan efisiensi usaha

dan sistem agribisnis peternakan, tetapi seberapa jauh pembangunan agribisnis peternakan tersebut dapat melibatkan sebagian besar masyarakat khususnya peternak. Dalam keseluruhan sistem agribisnis, nilai tambah yang paling besar terdapat pada subsistem agribisnis hulu (penyediaan sarana produksi) dan hilir (pengolahan dan pemasaran) yang melibatkan sebagian kecil masyarakat, sedangkan pada subsistem produksi banyak melibatkan peternak kecil namun nilai tambahnya relatif kecil.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang menentukan efisiensi usaha ternak baik ditinjau dari aspek subsistem agribisnis, khususnya subsistem usahatani maupun sistem agribisnis secara keseluruhan. Untuk mengkaji efisiensi di tingkat subsistem usahatani, pendekatan dilakukan melalui analisis kelayakan finansial atau keunggulan kompetitif. Sementara itu untuk tingkat sistem agribisnis secara keseluruhan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis kelayakan ekonomi atau keunggulan komparatif. Untuk mengetahui besaran-besaran yang mengindikasikan kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi tersebut digunakan review hasil-hasil studi terdahulu.

PROFITABILITAS DAN DAYA SAING PRODUK TERNAK

Analisis Usahatani

Usahatani merupakan satu dari empat subsistem dalam sistem agribisnis. Pada subsistem ini dilakukan kegiatan budidaya yang merupakan inti dari kegiatan produksi peternakan. Usahatani dapat dibedakan menjadi usahatani komersial dan usahatani kecil (subsisten). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari erat dan pentingnya kaitan antara usahatani dan rumah tangga. Usahatani komersial dapat dilihat sebagai suatu perusahaan. Oleh karena itu kemampuan usahanya dapat dinilai layaknya suatu perusahaan. Untuk penilaian tersebut antara lain dapat dilakukan melalui analisis usahatani.

Analisis usahatani yang biasa dilakukan menggunakan teknik tabulasi (akunting) yang sebenarnya diturunkan dari fungsi keun-

tungan yang didefinisikan sebagai selisih antara nilai produksi dan jumlah nilai input yang digunakan. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa keuntungan usaha dipengaruhi oleh tingkat harga input yang digunakan dan harga output yang dihasilkan serta jumlah fisik input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Dibelakang faktor harga dan fisik tersebut banyak faktor yang menentukan seberapa besar keuntungan usahatani yang diperoleh. Faktor-faktor tersebut antara lain teknologi yang digunakan, manajemen usaha yang dilakukan, kelembagaan pasar input, dan pasar output yang terjadi yang satu sama lain saling berinteraksi.

Menurut Soekartawi *et al.* (1986), analisis usahatani dapat dibedakan berdasarkan : (1) ukuran arus uang tunai, namun tidak mencakup penerimaan pinjaman dan pengeluaran bunga pinjaman, dan (2) ukuran arus tunai dan tidak tunai. Penggunaan arus tunai saja belum menggambarkan keadaan usahatani seluruhnya, karena yang tidak termasuk uang tunai juga penting, terutama pada usahatani subsisten dan semi-subsisten. Arus tidak tunai yang perlu diperhitungkan adalah: kenaikan nilai ternak yang belum dilakukan transaksi jual beli; penggunaan hasil untuk konsumsi, untuk bibit dan untuk transaksi (barter) serta hadiah; dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga. Penentuan nilai tidak tunai ini dapat dilakukan dengan menggunakan harga pasar setempat.

Dari hasil analisis keuntungan usahatani dapat dilakukan analisis lebih lanjut yang dapat menggambarkan tingkat efisiensi atau profitabilitas usaha, antara lain analisis biaya produksi persatuan output, *Return Cost Ratio* (RCR), dan *Benefit Cost Ratio* (BCR). Hasil analisis usahatani dapat digunakan pula untuk analisis investasi dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu : *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Benefit Cost Ratio*, *Profitability Ratio*, dan *Pay Back Period*.

Pada usaha ternak dengan berasumsi peternak penerima harga (*price taker*) baik harga input maupun output, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha adalah kegiatan untuk meningkatkan produksi semaksimal mungkin dengan biaya yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan tiga aspek penting agar produksi usahatani ternak

dapat berhasil dengan baik, yaitu : bibit ternak yang digunakan; jumlah dan teknik pemberian pakan; dan manajemen usaha ternak itu sendiri.

Aspek Bibit

Pada usaha ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kambing dan domba) bibit merupakan komponen biaya yang relatif besar (Ilham dan Saktyanu, 1995). Disamping itu, sebagai unit industri biologis yang mampu merubah material relatif kurang bernilai (pakan) menjadi material yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia (daging, telur, dan susu), kualitas bibit sangat menentukan tingkat produksi. Bibit ternak yang berkualitas baik dapat dilihat dari tingkat produktivitasnya, antara lain berupa pertambahan berat badan per hari pada ternak potong, produksi susu per ekor per laktasi, dan produksi telur per siklus usaha. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan genetik ternak tersebut, dalam hal ini antara lain jumlah dan kualitas pakan serta lokasi usaha yang sesuai dengan adaptasi hidup ternak.

Hasil studi Hadi dan Ilham (2000) pada usaha sapi potong di Wonosobo dan Grobogan menunjukkan bahwa usaha penggemukan dan pembibitan dengan menggunakan bibit bangsa turunan sapi FH dan Simental memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan menggunakan bangsa sapi turunan PO dan Simental (Tabel 1). Perbedaan tersebut antara lain disebabkan kemampuan

sapi tersebut mengkonversi pakan menjadi daging yang diturunkan secara genetik dan didukung oleh manajemen pemeliharaan yang baik sehingga mampu menghasilkan performa produksi yang baik pula. Pada ternak ayam ras potensi genetik bibit ini telah dimanfaatkan dengan baik, namun pada ternak lainnya masih potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan subsektor peternakan.

Aspek Pakan

Pakan merupakan aspek penting dalam usaha ternak selain bibit. Pada peternakan ayam ras pedaging biaya pakan merupakan 55,6 – 66,6 persen dari total biaya produksi (Saptana dan Rusastra, 2001). Kondisi ini tidak jauh berbeda pada ayam ras petelur, karena pemanfaatan teknologi pakan sudah sedemikian maju pada usaha ayam ras. Sebaliknya untuk ternak ruminansia, sebagian besar peternak masih menggunakan pakan sesuai dengan potensi yang ada yang pada umumnya berasal dari rumput alam yang dicari atau bahkan dengan melepas ternak pada padang penggembalaan umum yang kualitasnya rendah.

Dengan demikian perbaikan pemberian pakan baik dari segi jumlah, mutu, dan teknik penyajiannya diharapkan masih mampu meningkatkan efisiensi usaha ternak. Menurut pihak *feedlotter*, dengan menggunakan kombinasi pakan tertentu, usaha penggemukan sapi potong eks impor yang dilakukannya dan plasmanya mampu menghasilkan pertambahan berat badan per hari yang relatif tinggi,

Tabel 1. Hasil Analisis BCR Usaha Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong di Jawa Tengah, Tahun 1998 dan 2000

| Uraian | NVP (Rp) | BCR | IRR (%) |
|--|-------------|-------|---------|
| Pembibitan : | | | |
| 1. Sapi Turunan PFH dan Simental-Wonosobo (2000) | 104.979 | 1,003 | 18,37 |
| 2. Sapi Turunan PO dan Simental-Grobogan (1998) | -18.784.850 | 0,730 | < 0 |
| Penggemukan : | | | |
| 1. Sapi Turunan PFH dan Simental-Wonosobo (2000) | 17.809.694 | 1,170 | > 18 |
| 2. Sapi Turunan PO dan Simental-Grobogan (1998) | 15.032.951 | 1,150 | >18 |

Keterangan : tingkat bunga bank = 18 persen
Sumber : Hadi dan Ilham, 2000.

Tabel 2. Analisis Benefit Cost pada Penggemukan Sapi PO selama 120 hari (Rp/ekor)

| Uraian | Perlakuan*) | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | T1 | T2 | T3 |
| Biaya Produksi dan Pemasaran | 1.385.016 | 1.450.641 | 1.373.846 |
| 1. Ternak bakalan | 1.104.900 | 1.148.400 | 1.075.755 |
| 2. Pakan | 226.196 | 248.321 | 244.171 |
| 3. Obat | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. Tenaga kerja | 16.920 | 16.920 | 16.920 |
| 5. Penyusutan | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Pemasaran | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Pendapatan | 1.863.000 | 1.897.200 | 1.807.200 |
| Margin | 477.984 | 446.559 | 433.354 |
| B/C Ratio | 1,345 | 1,308 | 1,315 |

*) Keterangan : T1 = Konsentrat mengandung bungkil kedelai tanpa molases (kontrol)

T2 = T1 ditambah molases 15 persen

T3 = T1 ditambah molases 20 persen

Sumber : Budiarsana dan Haryanto, 1997

yaitu antara 1,25 hingga 1,50 kg/ekor/hari. Pada usaha penggemukan rakyat yang menggunakan sapi persilangan Simental pertambahan beratnya berkisar 1,18 – 1,32 kg/ekor/hari (Subiharta *et al.*, 2000). Sementara itu pada kondisi peternakan tradisional pertambahan berat badan hanya berkisar 0,50 kg/ekor/hari (Ilham dan Saktyanu, 1995). Penelitian Budiarsana dan Haryanto (1997) menunjukkan bahwa walaupun sudah ada upaya perbaikan pakan terhadap Sapi PO, manfaatnya tidak berbeda pada kondisi kontrol (Tabel 2).

Selain perbaikan mutu pakan, menurut Siregar (1992), frekuensi pemberian pakan lebih dari dua kali sehari dapat meningkatkan konsumsi pakan maupun zat-zat makanan, serta meningkatkan daya cerna terhadap pakan yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi susu. Padahal saat ini pemberian pakan tersebut sebagian besar masih dilakukan dua kali sehari, khususnya pada peternak sapi perah di Jawa Timur (Ilham, 2000). Artinya perbaikan manajemen pakan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Aspek Manajemen

Aspek manajemen antara lain meliputi pola kelembagaan usaha peternakan, skala pengusahaan, dan lokasi usaha. Aspek ini tidak berkaitan langsung dengan teknik produksi ternak, namun berpengaruh terhadap efisiensi usaha ternak yang dilakukan. Kera-

gaman aspek manajemen yang tinggi pada usaha peternakan rakyat merupakan potensi untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan di Indonesia.

Pola usaha juga menentukan tingkat manajemen usaha. Peternak yang mengikuti pola kemitraan manajemen usahanya akan lebih baik, karena peternak tidak terlalu memikirkan bagaimana harus mengadakan sarana produksi peternakan dan memasarkan hasil produksi dan juga lebih akses terhadap teknologi yang diterima melalui mitranya. Sebaliknya pada pola mandiri, peternak harus memperhatikan semua aspek agribisnis usahanya, sehingga peluang risiko yang diterima semakin tinggi. Pada usaha ternak ayam ras pola kemitraan ini banyak diaplikasikan dan sudah berkembang.

Adanya krisis ekonomi pertengahan 1997 menyebabkan terganggunya usaha ternak ayam ras akibat banyaknya komponen impor yang digunakan pada usaha ini. Namun demikian menurut Saptana dan Rusastra (2000), usaha ternak ayam ras dengan pola kemitraan masih layak untuk dikembangkan walaupun dengan tingkat profitabilitas yang menurun akibat dari krisis tersebut. Pola mandiri sudah tidak layak untuk dikembangkan kecuali pada usaha ayam ras petelur.

Kasus pada usaha sapi perah, banyak studi menyatakan bahwa rata-rata skala pengusahaan sapi perah induk di berbagai sentra produksi susu segar berkisar 2 – 3 ekor tiap

Tabel 3. Analisis Usahatani Sapi Perah pada Berbagai Skala Usaha di Indonesia, 1999

| Uraian | 2 – 4 ekor | 5 – 7 ekor | > 7 ekor | Total |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Penerimaan (Rp) | 15.882.658 | 30.434.886 | 49.969.600 | 23.940.769 |
| Biaya (Rp) | 10.224.728 | 18.318.519 | 32.099.513 | 15.033.868 |
| Pendapatan (Rp) | 5.657.929 | 12.116.367 | 17.870.087 | 8.906.901 |
| B/C Ratio | 0,55 | 0,66 | 0,56 | 0,59 |

Sumber : Swastika *et al.*, 2000.

peternak. Padahal tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada skala pengusahaan 5 – 7 ekor (Swastika *et al.*, 2000) (Tabel 3). Untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan tambahan sapi induk yang dipelihara. Selain disebabkan keterbatasan modal, kendala peningkatan skala usaha adalah terbatasnya pemilikan lahan untuk kandang dan kebun rumput. Untuk mengatasi kendala ini pada beberapa daerah dikembangkan konsep Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) dimana di dalam kawasan tersebut terdapat kandang, kebun rumput dan fasilitas lain yang memadai.

Keunggulan Komparatif

Daya saing atau efisiensi ekonomi relatif suatu sistem komoditas dapat dinilai dari koefisien rasio biaya sumberdaya domestik (*Domestic Resource Cost Ratio* = DRCR). Jika nilai DRCR lebih kecil dari satu, maka aktivitas ekonomi komoditas yang dianalisis efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik. Atau dalam perkataan lain komoditas tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Pemenuhan permintaan terhadap suatu komoditas akan lebih menguntungkan diproduksi di dalam negeri dari pada harus mengimpor.

Untuk menghitung koefisien DRCR digunakan analisis matriks kebijaksanaan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) menurut Monke dan Pearson (1989). Semakin kecil nilai DRCR, semakin efisien komoditas tersebut diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, jika nilai DRCR lebih besar dari satu, maka pemenuhan permintaan dalam negeri akan lebih efisien dilakukan dengan cara mengimpor.

Berbeda dengan analisis usahatani atau kelayakan finansial, ruang lingkup analisis hanya pada masing-masing subsistem secara terpisah. Pada analisis keunggulan komparatif yang merupakan analisis sistem komoditas, ruang lingkup analisis mencakup keseluruhan

dari sistem agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan internasional. Oleh karena itu selain dipengaruhi oleh sistem agribisnisnya juga dipengaruhi pasar internasional dimana variabel nilai tukar rupiah sangat menentukan kestabilan daya saing komoditas yang dianalisis.

Beberapa hasil studi tentang keunggulan komparatif komoditas peternakan menunjukkan bahwa untuk memenuhi permintaan produk ternak dalam negeri akan lebih efisien diproduksi di dalam negeri dari pada harus mengimpor. Ilham dan Swastika (2001) memperoleh nilai DRCR produk susu segar pada tingkat Industri Pengolahan Susu (IPS) sebesar 0,5735 – 0,6713, berturut-turut untuk dataran rendah (Pasuruan dan Sumedang) dan dataran tinggi (Bandung dan Malang). Adnyana *et al.* (1997) memperoleh nilai DRCR produk daging sapi pada berbagai pola usaha berkisar 0,5466 – 0,9825 (Tabel 4); Saptana dan Rusastra (2001) memperoleh nilai DRCR produk daging ayam ras berkisar 0,855 – 0,921 (Tabel 5); sedangkan Hutabarat dan Winarso (1994) memperoleh nilai DRCR untuk pengusahaan babi anak 0,16; usaha babi tanggung 0,90; usaha babi potong 0,72; dan untuk petani ternak babi potong sebesar 0,70.

Seperti diutarakan sebelumnya, nilai DRCR ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi subsistem yang ada dan sistem agribisnis secara keseluruhan. Untuk itu selain keharusan adanya efisiensi usaha di tingkat subsistem, sistem agribisnis tersebut hendaknya dikelola secara terintegrasi. Jika kita lihat nilai DRCR, usaha menghasilkan daging sapi dan daging ayam akan lebih efisien pada pola usaha kemitraan dimana derajat integrasi sistem agribisnisnya lebih tinggi dibandingkan usaha pola mandiri. Makin tinggi derajat integrasi sistem agribisnis produk ternak berarti margin gandanya akan semakin kecil dan sistem agribisnisnya akan semakin efisien. Hanya

Tabel 4. Analisis Keunggulan Komparatif Usaha Ternak dan Memproduksi Daging Sapi di Provinsi Lampung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, 1995

| Pola Usaha | DRCR di Lokasi | |
|---------------------------|----------------|-------------|
| | RPH Lokal | RPH Jakarta |
| Lampung : | | |
| 1. Pola PIR Kredit | 0,547 | 0,656 |
| 2. Pola PIR swadana | 0,921 | 0,939 |
| Jawa Timur – Magetan | 0,940 | 0,981 |
| Nusa Tenggara Barat : | | |
| 1. Lombok Barat (Housing) | 0,883 | 0,960 |
| 2. Sumbawa (grazing) | 0,806 | 0,983 |

Sumber : Adnyana *et al.*, 1997.

Tabel 5. Analisis Keunggulan Komparatif Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat, 1998

| Pola Usaha | DRCR | |
|---|------------------------|------------------------|
| | Sebelum Krisis Ekonomi | Setelah Krisis Ekonomi |
| Kabupaten Bogor | | |
| 1. Pola Kinak Pra Skala 5000 ekor | 0,843 | 0,855 |
| 2. Pola Kinak PIR Skala 6000 ekor | 0,753 | 0,891 |
| 3. Pola Mandiri Skala 8000 ekor | 0,764 | 0,917 |
| 4. Pola Kontrak Kandang Skala 30.000 ekor | 0,792 | 0,921 |
| Kabupaten Tasikmalaya | | |
| 1. Pola Kinak P:RA Skala 6000 ekor | 0,837 | 0,870 |
| 2. Pola Kontrak Kandang dan Jasa Tenaga Kerja Skala 5000 ekor | 0,799 | 0,862 |

Sumber : Saptana dan Rusastra, 2001

masalahnya sistem agribisnis yang terintegrasi tersebut sulit dilakukan oleh peternak yang mempunyai modal terbatas dengan skala usaha yang kecil.

Usaha produksi susu segar dalam negeri yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) derajat integrasi tersebut sudah baik. Aktivitas subsistem pengadaan sarana produksi seperti : pengadaan bibit, pakan, dan obat-obatan dilakukan oleh koperasi. Demikian pula halnya aktivitas pada subsistem hilir yaitu pengolahan pemasaran juga telah ditangani koperasi, namun untuk pengolahan volumenya masih terbatas (Swastika *et al.*, 2000). Menurut Yusdja dan Iqbal (1999) manfaat yang diterima dari aktivitas di hulu dan hilir tersebut belum banyak bermanfaat bagi peternak, karena hanya merupakan lahan garapan beberapa pengelola koperasi. De-

ngan mekanisme kerja yang baik dan memberdayakan peran anggota diharapkan masalah tersebut dapat dihilangkan.

UPAYA-UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI

Upaya peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Beberapa sumberdaya yang perlu dioptimalkan penggunaannya pada usaha ternak adalah sumberdaya alam seperti bahan baku pakan lokal dan bibit ternak lokal; sumberdaya kapital berupa kredit program; sumberdaya teknologi peternakan; dan sumberdaya manusia dalam hal ini peternak sebagai manajer dan pekerja. Hal tersebut dapat dilakukan pada masing-masing subsistem atau dalam sistem secara keseluruhan.

Upaya peningkatan efisiensi dari sisi produksi (subsistem) dapat dilakukan dengan cara memperkecil kesenjangan teknologi hasil penelitian dengan penerapan aktualnya di masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor biaya-manfaat dari aktivitas tersebut. Di samping itu pada tingkat teknologi yang penerapannya sudah maksimal seperti penggunaan berbagai *breed* untuk menghasilkan *final stock* dengan penggunaan pakan konsentrat yang sudah maju saat ini, perlu diupayakan penemuan *breed* baru dengan kondisi pakan tertentu sehingga mampu menghasilkan ternak dengan penambahan berat badan per harinya yang tinggi dengan biaya pakan yang relatif murah. Sementara itu dalam sistem agribisnis perlu konsolidasi antar subsistem antara lain melalui koordinasi integrasi vertikal dalam kesatuan keputusan manajemen dan menghilangkan sekat-sekat yang ada antar subsistem sehingga mampu menghilangkan marjin ganda dan memperkecil terjadinya asimetri informasi yang terjadi selama ini.

Pengadaan Sarana Produksi

Sarana produksi utama dalam kegiatan usaha ternak adalah bibit dan pakan. Pada usaha ternak unggas kedua faktor produksi tersebut sudah cukup optimal dimanfaatkan, sebaliknya terjadi pada usaha ternak sapi perah, sapi potong dan ternak kecil. Pada saat ini rata-rata induk sapi perah yang dipelihara pada usaha peternakan rakyat produktivitasnya masih rendah yaitu berkisar 3.127 – 4.848 liter/ekor/laktasi (Swastika *et al.*, 2000). Menurut Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Teranak Baturaden (2000) kisaran produksi tersebut masih masuk dalam katagori sertifikat kelas C dengan kisaran Produksi 4.000 – 5.000 liter, sedangkan kelas A dan B masing-masing lebih dari 6.000 liter dan berkisar 5.001 – 6.000 liter.

Pada usaha sapi potong, kegiatan inseminasi buatan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan populasi ternak masih belum banyak memberikan hasil yang diharapkan, khususnya untuk daerah sentra-sentra produksi peternakan luar Jawa. Sementara itu di Jawa dan beberapa daerah luar Jawa yang kegiatan usaha penggemukan sapi-sapi persilangan keturunan *Bos*

taurus (Sapi Eropa), seperti *Simental*, *Limosin*, dan *Angus*, peternak mengalami kesulitan mendapatkan sapi bakalan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kegiatan usaha pembibitan karena kurang memberikan insentif bagi peternak dan keterbatasan produksi semen beku untuk bangsa sapi tersebut sehingga distribusinya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin mahalnya harga ternak sapi potong bakalan di daerah sentra penggemukan.

Pada usaha ternak kecil khususnya kambing/domba hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bibit adalah perlunya menjaga kelestarian bibit lokal yang dapat digunakan untuk kegiatan pemulia agar dapat menghasilkan ternak dengan produktivitas tinggi. Adanya kesempatan yang diberikan kepada Indonesia (kawasan IMT-GT) untuk memasok kebutuhan ternak bagi negara di kawasan Timur Tengah hingga kini belum dapat dipenuhi diantaranya disebabkan tidak mampunya kita menghasilkan domba potong dengan berat hidup yang disyaratkan.

Untuk mengatasi hal tersebut selain yang telah dilakukan pihak swasta, hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya dalam kegiatan perbibitan ternak, baik melalui penelitian pemulia, seleksi ternak dan penemuan *cross breed* yang mempunyai penampilan produksi yang tinggi yang tentunya harus didukung dengan produksi semen yang berkualitas dan disenangi pasar. Disamping itu untuk mendukung usaha pembibitan, hendaknya pihak swasta dilibatkan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan berusaha. Sementara itu pada sisi peternakan rakyat, pengembangan usaha pembibitan yang dilakukan pemerintah hendaknya selalu dikaitkan dengan program penggemukannya. Artinya peternak yang mendapat paket program penggemukan diwajibkan juga melakukan kegiatan pembibitan secara bersama dan sebaliknya, sehingga peternak akan mendapatkan insentif dalam berusaha.

Produksi

Pada subsistem produksi skala usaha peternak sangat menentukan efisiensi usaha. Oleh karena itu perlu peningkatan skala usaha hingga pada skala yang optimal. Untuk itu

diperlukan modal. Hal ini dapat dilakukan melalui program kredit, karena hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar usaha ternak selalu berhasil dalam melaksanakan program kredit asalkan sasaran penerima kredit diseleksi dengan baik dan tidak terburu-buru.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan untuk kandang dan kebun rumput akibat peningkatan skala usaha dapat dilakukan pengembangan Kawasan Usaha Peternakan khususnya dalam bentuk lahan pengembalaan. Selama ini secara fisik kawasan tersebut sudah ada tapi diperebutkan antar beberapa kepentingan (perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan lainnya).

Pengolahan

Kualitas produk peternakan sangat sensitif terhadap perlakuan yang diberikan sejak berupa bentuk daging dan susu sampai ke tangan konsumen. Kualitas merupakan salah satu syarat daya saing suatu produk. Untuk meningkatkan kualitas akhir produk peternakan berupa daging dan susu diperlukan fasilitas pengolahan yang memenuhi standar dan *higienis*. Untuk itu diperlukan fasilitas rumah potong ternak yang standar dan dengan ukuran sesuai dengan kapasitas pelayanan pasarnya.

Khusus untuk susu segar yang selama ini pasarnya masih terbatas perlu diupayakan untuk melakukan diversifikasi produk menjadi produk olahan antara lain berupa susu pasteurisasi yang dikemas dengan baik sehingga dapat dipasarkan lebih luas. Demikian pula halnya dengan yoghurt, keju, dan produk lainnya. Selama ini upaya tersebut sudah mulai dilakukan namun perlu ditingkatkan sehingga nilai tambah yang diperoleh peternak dan koperasinya semakin meningkat.

Pemasaran

Sarana transportasi ternak potong antar pulau selama ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana kapal, sehingga pedagang harus menunggu beberapa hari agar ternaknya dapat diantarpulaukan. Ditambah lagi dengan adanya penyusutan berat badan

ternak selama dalam perjalanan. Disisi lain pedagang yang biasanya mengumpulkan ternak dari peternak yang menjual satu dua ekor membutuhkan pedagang-pedagang perantara sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama juga agar ternak tersebut dapat diantarpulaukan. Hal ini antara lain disebabkan oleh pemilikan ternak yang relatif kecil dan tidak semua daerah sentra produksi mempunyai pasar hewan. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya margin ganda dan pengeluaran yang tidak perlu.

Untuk mengatasi hal tersebut selain diperlukan infra struktur berupa kapal, kereta api dan pasar hewan, ada pemikiran untuk menggantikan perdagangan ternak hidup dengan daging segar dan beku. Namun hal tersebut membutuhkan waktu dan upaya, karena hingga saat ini konsumen masih lebih menyukai daging segar dari pada daging beku. Selain itu diperlukan sarana rumah potong hewan dan transportasi daging yang memenuhi standar.

Untuk menjamin agar kualitas produk ternak sampai ke konsumen maka selain fasilitas rumah potong ternak, diperlukan pula fasilitas pasar berupa toko daging (*meat shop*), los daging di pasar becek dan pasar swalayan yang memenuhi standar. Demikian pula dengan keberadaan depo atau distributor susu segar dan susu pasteurisasi beserta pengecer dengan fasilitas yang layak perlu lebih ditingkatkan untuk mendekatkan produk ini ke konsumen.

Sistem Agribisnis

Untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan menghilangkan margin ganda dalam usaha suatu komoditas peternakan diperlukan pengelolaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Upaya tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh perusahaan yang bermodal besar. Permasalahannya adalah sebagian besar pelaku agribisnis peternakan adalah peternak kelas menengah ke bawah. Agar pengembangan usaha agribisnis tersebut dapat mengakomodasi tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan sekaligus melibatkan peternak skala menengah kebawah, ada tiga alternatif integrasi yang mungkin dilakukan, yaitu : (1) integrasi vertikal yang dikelola

secara profesional oleh suatu perusahaan swasta; (2) integrasi vertikal yang dilakukan peternak secara bersama-sama yang terga-bung dalam wadah koperasi atau organisasi lainnya; dan (3) kombinasi diantaranya yang sering dikenal dengan usaha kemitraan.

Pengelompokan diatas sesuai dengan pendapat Yusdja *et al.* (2000), yang mengata-kan suatu agribisnis akan dapat berkembang bila memenuhi azas keterpaduan di antara subsistem yang ada dalam sistem agribisnis. Pembangunan peternakan melalui pendekatan agribisnis adalah pembangunan peternakan secara keseluruhan yang melibatkan *on farm* dan *off farm*, baik untuk skala besar mapun usaha rakyat. Dengan demikian peternak skala menengah didorong untuk mandiri dengan bantuan *public investment* untuk pengadaan fasilitas agribisnis yang menuntut biaya tinggi. Bagi usaha rakyat yang tidak memenuhi kegiatan agribisnis harus bermitra dengan peternak skala besar.

KESIMPULAN

Usaha ternak yang dilakukan di Indonesia sudah cukup efisien baik dilihat dari kriteria profitabilitas usaha maupun keung-gulan komparatifnya. Meskipun demikian, un-tuk meningkatkan daya saing produk ternak di pasar internasional maka efisiensi usaha ternak tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan efisiensi hendaknya dilakukan pada setiap subsistem agribisnis dan sistem agribisnis secara keseluruhan. Meskipun pe-ningkatan efisiensi tersebut dilakukan oleh pihak swasta (pengusaha dan peternakan rakyat), namun peran pemerintah masih tetap diperlukan.

Peran pemerintah yang diperlukan an-tara lain berupa investasi dalam bidang penelitian, penyuluhan, perbibitan, dan sarana pemasaran (pasar ternak, transportasi ternak, dan Rumah Potong Ternak). Di samping itu diperlukan juga peran kebijakan berupa pengaturan tata ruang dihubungkan dengan penyediaan lahan pengembalaan umum de-ngan dasar hukum yang kuat (Perda) pada daerah sentra produksi, dan pengaturan pola pengusahaan agar tidak terjadi benturan

antara usaha agribisnis besar (pengusaha) dengan usaha agribisnis berbasis kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O.; K. Kariyasa; N. Ilham; Saktyanu K. D.; dan Ikin Sadikin. 1997. Prospek dan Kendala Agribisnis Sapi Potong di Indonesia Memasuki Era Globalisasi Eko-nomi. Dalam : Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Ba-dan Penelitian dan Pengembangan Pertan-ian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Raden. 2000. Sekilas Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Raden. BPT-HMT Batu Raden Direktorat Jenderal Peternakan. Baturraden.
- Budiarsana, I.G.M. dan B. Haryanto. 1997. Analisis Ekonomi Penggemukan Sapi PO dengan Pemberian Pakan Mengandung By-Pass Protein. Prosiding Seminar Nasional Peter-nakan dan Veteriner. Jilid II. Pusat Peneli-tian dan Pengembangan Peternakan Ba-dan Penelitian dan Pengembangan Pertan-ian, Departemen Pertanian. Bogor
- Hadi, P.U. dan N. Ilham. 2000. Peluang Pengem-bangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong di Indonesia Dalam Rangka Swa-sembada Daging 2005. Makalah, disam-paikan pada "Pertemuan Teknis Penyedia-an Bibit Nasional dan Revitalisasi UPT TA 2000", Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Jakarta : 11 – 12 Juli 2000.
- Hutabarat, B. dan B. Winarso. 1994. Analisis Biaya Sumberdaya Dalam Negeri dan Kepekaan-nya pada Usaha Ternak Babi di Sumatera Utara. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 13, No. 1 : 61 – 75. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Ilham, N. dan D.K.S. Swastika. 2001. Analisis Daya Saing Susu Segar Dalam Negeri Pasca Krisis Ekonomi dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah di Indonesia. Makalah Bahan terbitan JAE (belum dipublikasi).
- Ilham, Nyak 2000. Peluang Peningkatan Produksi Susu pada Usaha Peternakan Sapi Perah

- di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan". Bogor, 8–9 Nopember 2000.
- Ilham, N. dan Saktyanu K. D. 1995. Analisis Usahatani Penggemukan Sapi Potong Berskala Kecil dan Potensi Pengembangannya. Prosiding Seminar Nasional Peternakan. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Monke, E.A. and S.K. Pearson. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University. Ithaca and London.
- Saragih, Bungaran. 1998. Agribisnis Berbasis Peternakan : Kumpulan Pemikiran. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Saptana dan I Wayan Rusastra. 2001. Dampak Krisis Moneter dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Agribisnis Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat. Makalah disampaikan pada Seminar Rutin intern Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 26 Januari 2001. Bogor.
- Siregar, S. B. 1992. Sistem Pemberian Pakan dalam Upaya Meningkatkan Produksi Susu Sapi Perah. Wartazoa, Vol. 2 No. 3 – 43 : 23 – 27.
- Soekartawi; A. Soeharjo; John L. Dillon; dan J. Brian Hardaker. 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. UI–Press. Jakarta.
- Subiharta *et al.* 2000. Pengkajian Sistem Usaha Pertanian Sapi Potong di Daerah Lahan Kering. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran, Jawa Tengah. Ungaran.
- Swastika, D.K.S.; N. Ilham; Tri B. Purwantini; dan Ikin Sadikin. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Prospek Pengembangan Peternakan Sapi Perah. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Yusdja, Y.; N. Ilham; W. K. Sejati; dan Valeriana Darwis. 2000. Review dan Outlook: Pengembangan Agribisnis Peternakan. Makalah (belum dipublikasi). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Yusdja, Y. dan M. Iqbal. 1999. Analisis Kebijakan Industri Persusuan Dalam Negeri. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Bogor.